

OMBUDSMAN NTT SAMBANGI SMK PELAYARAN LASIANA DAN SMK MARITIM NUSANTARA

Rabu, 28 Agustus 2024 - ntt

KUPANG - Menindaklanjuti pertemuan dengan eks-kepala sekolah SMK Pelayaran Kupang, Jesica Sonabela Sodakain terkait pembentukan SMK Pelayaran Kupang sebagai dampak adanya kisruh dengan Yayasan Yaspeltra Marindo, Ombudsman Perwakilan Provinsi NTT melihat langsung kegiatan belajar mengajar di SMK Pelayaran Lasiana dan SMK Maritim Nusantara dalam rangka mendengar informasi dari semua pihak yang berseteru, Selasa (27/08/2024).

"Kami melakukan kunjungan dan berdiskusi dengan Pembina Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang yang mengelola SMK Pelayaran Kupang saat ini, Jefri Antoni dan melihat langsung suasana kegiatan belajar mengajar peserta didik SMK Maritim Nusantara di asrama sekolah di Lasiana dan peserta didik kelas XI dan XII yang dititip mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMA PGRI Kupang di Kuanino pada Kamis (27/8) Pukul 9.30 wita - Pukul 11.30 WITA," jelas Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton.

Dari kunjungan ini Ombudsman NTT memperoleh data bahwa para siswa eks SMK Pelayaran Kupang berjumlah 307 orang yang terdiri dari kelas X sebanyak 144 orang, kelas XI sebanyak 74 orang dan kelas XII sebanyak 89 orang.

Saat ini mereka menjalani proses belajar mengajar di tenda darurat yang dibangun di sekitar asrama dan sebagian dititip di SMA PGRI Kupang. Sementara itu SMK Pelayaran Kupang hanya terdapat 7 peserta didik dengan 14 guru yang baru direkrut.

"Hemat kami, peserta didik sebanyak 307 orang tersebut harus mendapat perlindungan pemerintah provinsi NTT dari kisruh internal sekolah," lanjutnya.

Pasalnya peserta didik kelas XI sebanyak 74 orang dan kelas XII sebanyak 89 orang tersebut tidak lagi tercatat di Dapodik sekolah SMK Pelayaran Kupang dan tidak pula tercatat di Dapodik SMK Maritim Nusantara karena sekolah ini baru sebatas mengajukan izin operasional sekolah di Pemerintah Provinsi NTT dan sedang menunggu rekomendasi Dinas Pendidikan.

Hal ini tentu merugikan para peserta didik dan orang tua karena pemenuhan hak-hak anak untuk mengikuti ujian dan mendapat ijazah akan terkendala karena tidak tercatat sebagai peserta didik di sekolah manapun dalam Dapodik Kementerian Pendidikan Nasional. "Kami berharap, apapun masalah yang terjadi antara sekolah dan yayasan, kepentingan anak adalah hal yang harus diutamakan. Kami akan terus berupaya melalui koordinasi dengan semua pihak agar hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak terpenuhi," tutupnya.